

**LAPORAN PELAKSANAAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN
APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI**



TAHUN 2022



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



ရေဒီယို၊ ဖုန်း၊ အင်တာနက်၊ အီးမေးလ်၊ ဖက်စ်ဘွတ်ခ်၊ ဟိတ်စ်

JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 14 NITI MANDALA, DENPASAR (80235)

ရေဒီယို၊ ဖုန်း၊ အင်တာနက်၊ အီးမေးလ်၊ ဖက်စ်ဘွတ်ခ်၊ ဟိတ်စ်

TELEPON (0361) 243931

EMAIL: inspektorat@baliprov.go.id WEBSITE: <https://inspektorat.baliprov.go.id>

LAPORAN PELAKSANAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI TAHUN 2022

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Tahun 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/03/M.PAN/04/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan



dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 5);

- Keputusan Gubernur Bali Nomor 1330/02-B/HK/2015 tentang Wajib Laporkan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

II. TUJUAN PELAKSANAAN

Dalam rangka pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi yang diawali dengan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagaimana diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Bagi Aparatur Sipil Negara yang tidak menjadi wajib lapor LHKPN melaporkan perubahan harta kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) menggunakan SIHARKA (Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan) sebagaimana diwajibkan berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

III. WAJIB LAPOR

Menetapkan wajib lapor LHKASN kepada seluruh ASN selain wajib lapor LHKPN.

IV. REKAPITULASI DAN TATACARA PELAPORAN PERTAHUN

- Pada Tahun 2011-2016 masih menggunakan Pelaporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P).
- Pelaporan LHKASN menggunakan SIHARKA di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dimulai pada tahun 2017, sebagai tahap pengenalan LHKASN menggunakan SIHARKA pelaporan diwajibkan kepada seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (kecuali yang sudah melaporkan LHKPN). Periode pelaporan dimulai dari bulan Januari sampai pertengahan bulan Desember tahun 2017 dengan hasil rakapitulasi sebagai berikut :

Jumlah	
Sudah Melapor (org)	Belum Melapor (org)
11.414	1.246



3. Pelaporan LHKASN menggunakan SIHARKA di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2018 terdapat perubahan kriteria wajib lapor dan periode pelaporan menyesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Di Lingkungan Instansi Pemerintah yaitu pada poin 2 yang menyebutkan bahwa:

- Menetapkan wajib lapor kepada seluruh pegawai ASN selain pada butir 1 secara bertahap dan dimulai dari pejabat setingkat Eselon III, IV dan V untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada pimpinan instansi pemerintah masing-masing dengan ketentuan:
 1. Menggunakan format pelaporan sebagaimana terlampir;
 2. Laporan tersebut disampaikan paling lambat: 3 (tiga) bulan setelah kebijakan ditetapkan, 1 (satu) bulan setelah pejabat sebagaimana dimaksud pada butir 2 tersebut diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi dan 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.

Dilatarbelakangi dari aturan tersebut dan berdasarkan hasil pendampingan dari tim LHKASN Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 5 April 2018 di Kantor Inspektorat Provinsi Bali maka pelaporan LHKASN menggunakan SIHARKA pada tahun 2018 diwajibkan khusus bagi ASN (diluar anggota LHKPN) yang mengalami periode Promosi , Mutasi dan Pensiun.

Rekapitulasi pelaporan LHKASN pada tahun 2018 sebagai berikut :

Jumlah ASN Prov.Bali th 2018	Peserta LHKASN th 2018	Wajib Lapor LHKASN th 2018	Status	
			Sudah Melapor LHKASN	Belum Melapor LHKASN
11.318	11.104	1.452	270	1.181

Keterangan :

- Rendahnya jumlah pelaporan LHKASN pada tahun 2018 disikapi secara langsung oleh Inspektorat Provinsi Bali dengan melakukan konsultasi kepada admin LHKASN pada Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Terdapat beberapa masukan dan rekomendasi yang diberikan yaitu:
 1. Pihak Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sangat mengapresiasi proses input data LHKASN menggunakan SIHARKA di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang langsung diimplementasikan kepada seluruh ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali.



2. Mengenai periode pelaporan LHKASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali dapat menyesuaikan sesuai kebijakan masing-masing daerah, namun pada dasarnya konsep pelaporan LHKASN dibuat dan dilaksanakan apabila ASN mengalami perubahan harta kekayaannya. Dapat diartikan bahwa ASN bersangkutan yang bertanggungjawab penuh terhadap proses pelaporan harta kekayaannya masing-masing. Apabila tidak melapor dapat dikenakan sanksi sesuai aturan yang telah ditetapkan.
3. Inspektorat selaku APIP di daerah bertanggungjawab pada pemberian username dan password SIHARKA kepada seluruh wajib lapor LHKASN serta proses rekapitulasi dan verifikasi pelaporan pertahun.
4. Pelaporan LHKASN menggunakan SIHARKA di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2019 diwajibkan kepada seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (kecuali wajib lapor LHKPN). Periode pelaporan dimulai dari bulan januari sampai akhir bulan Desember tahun 2019 dengan hasil rakapitulasi sebagai berikut :

Jumlah ASN Prov.Bali th 2019	Peserta LHKASN th 2019	Status		Persentase Pelaporan LHKASN th 2019
		Sudah Melapor LHKASN th 2019	Belum Melapor LHKASN th 2019	
11.516	11.172	10.138	1.034	90,7%

5. Pelaporan LHKASN menggunakan SIHARKA di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2020 menggunakan skema wajib lapor dan periode pelaporan yang sama dengan tahun sebelumnya (2019), dengan hasil rekapilusi pelaporan sebagai berikut :

Jumlah ASN Prov.Bali th 2020	Wajib Lapor LHKASN th 2020	Status		Persentase Pelaporan LHKASN th 2020
		Sudah Melapor LHKASN th 2020	Belum Melapor LHKASN th 2020	
10.968	10.620	10.408	210	98%



6. Pelaporan LHKASN menggunakan SIHARKA di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2021 menggunakan skema wajib lapor dan periode pelaporan yang sama dengan tahun sebelumnya (2020), dengan hasil rekapilusi pelaporan sebagai berikut :

Jumlah ASN Prov.Bali th 2021 *	Wajib Lapor LHKASN th 2021	Status		Persentase Pelaporan LHKASN th 2021
		Sudah Melapor LHKASN th 2021	Belum Melapor LHKASN th 2021	
10.951	10.658	10.658	0	100%

(* Sumber database kepegawaian oleh BKD Provinsi Bali per 16 Maret 2021)

7. Pelaporan LHKASN menggunakan SIHARKA di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2022 menggunakan skema wajib lapor dan periode pelaporan yang sama dengan tahun sebelumnya (2021), namun sesuai Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/11/PW.99/2022 Tanggal: 26 Oktober 2022 Tentang: Pemberitahuan terkait Maintenance Aplikasi SIHARKA (Sistem Informasi Harta Kekayaan ASN), terdapat beberapa ASN dengan status belum lapor saat periode maintenance diarahkan untuk melaksanakan pelaporan LHKASN tahun 2022 secara manual. Berikut merupakan rekapitulasi pelaporan LHKAN menggunakan SIHARKA dan manual pada tahun 2022 :

Jumlah ASN Prov.Bali th 2022 *	Wajib Lapor LHKASN th 2022	Status		Persentase Pelaporan LHKASN th 2022
		Sudah Melapor LHKASN th 2022	Belum Melapor LHKASN th 2022	
10.361	10.063	10.063	0	100%

(* Sumber database kepegawaian oleh BKD Provinsi Bali per Januari 2022)

	Ditandatangani secara elektronik oleh :
	INSPEKTUR I Wayan Sugiada NIP. 19651231 198603 1 175



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



DAFTAR REKAPITULASI
PELAKSANAAN LHKASN TINGKAT
PEMERINTAHAN PROVINSI BALI
TAHUN 2022

NO.	NAMA INSTANSI	JUMLAH PEGAWAI (ASN)	WAJIB LHKASN	WAJIB LHKASN				SUDAH MELAPOR SIHARKA				Total Sudah Melapor Th. 2022	BELUM MELAPOR SIHARKA				Total Belum Melapor Th. 2022	PERSENTASE PELAPORAN (%)
				Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Pelaksana	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Pelaksana		Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Pelaksana		
1	Inspektorat Daerah Provinsi Bali	97	30	0	1	3	26	0	1	3	26	30	0	0	0	0	0	100
2	Sekretariat DPRD Provinsi Bali	59	54	0	0	1	53	0	0	1	53	54	0	0	0	0	0	100
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali	73	68	0	3	1	64	0	3	1	64	68	0	0	0	0	0	100
4	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali	133	127	0	7	11	109	0	7	11	109	127	0	0	0	0	0	100
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali	111	107	1	3	8	95	1	3	8	95	107	0	0	0	0	0	100
6	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali	387	374	0	3	31	340	0	3	31	340	374	0	0	0	0	0	100
7	Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	51	47	0	2	1	44	0	2	1	44	47	0	0	0	0	0	100
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali	76	70	0	1	4	65	0	1	4	65	70	0	0	0	0	0	100
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali	51	47	0	3	1	43	0	3	1	43	47	0	0	0	0	0	100
10	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	117	112	0	2	10	100	0	2	10	100	112	0	0	0	0	0	100
11	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali	5943	5925	0	2	3	5920	0	2	3	5920	5925	0	0	0	0	0	100
12	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	535	524	0	1	21	502	0	1	21	502	524	0	0	0	0	0	100
13	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali	113	103	0	3	7	93	0	3	7	93	103	0	0	0	0	0	100
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali	62	55	0	1	1	53	0	1	1	53	55	0	0	0	0	0	100
15	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Bali	77	74	0	5	1	68	0	5	1	68	74	0	0	0	0	0	100
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	273	262	0	4	13	245	0	4	13	245	262	0	0	0	0	0	100
17	Dinas Perhubungan Provinsi Bali	89	80	0	3	23	54	0	3	23	54	80	0	0	0	0	0	100
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bali	74	66	0	1	5	60	0	1	5	60	66	0	0	0	0	0	100
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali	87	79	0	2	6	71	0	2	6	71	79	0	0	0	0	0	100
20	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	138	131	1	4	10	116	1	4	10	116	131	0	0	0	0	0	100
21	Dinas Pariwisata Provinsi Bali	61	59	0	5	1	53	0	5	1	53	59	0	0	0	0	0	100
22	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali	139	131	0	3	14	114	0	3	14	114	131	0	0	0	0	0	100
23	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	54	49	0	3	1	45	0	3	1	45	49	0	0	0	0	0	100
24	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	217	202	0	2	22	178	0	2	22	178	202	0	0	0	0	0	100
25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali	178	166	0	1	19	146	0	1	19	146	166	0	0	0	0	0	100
26	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali	111	97	0	1	14	82	0	1	14	82	97	0	0	0	0	0	100
27	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali	70	66	0	0	1	65	0	0	1	65	66	0	0	0	0	0	100
28	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bali	34	32	0	1	1	30	0	1	1	30	32	0	0	0	0	0	100
29	Biro Hukum Provinsi Bali	33	32	0	2	1	29	0	2	1	29	32	0	0	0	0	0	100
30	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Bali	78	75	0	1	1	73	0	1	1	73	75	0	0	0	0	0	100
31	Biro Organisasi Provinsi Bali	74	70	0	3	2	65	0	3	2	65	70	0	0	0	0	0	100
32	Biro Umum dan Protokol Provinsi Bali	105	103	1	3	2	97	1	3	2	97	103	0	0	0	0	0	100
33	UPTD. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	416	410	0	8	0	402	0	8	0	402	410	0	0	0	0	0	100
34	UPTD. Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali	44	42	0	8	0	34	0	8	0	34	42	0	0	0	0	0	100
35	UPTD. Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali	182	178	0	9	0	169	0	9	0	169	178	0	0	0	0	0	100
36	Badan Penghubung Provinsi Bali	19	16	0	0	4	12	0	0	4	12	16	0	0	0	0	0	100
TOTAL		10.361	10.063	3	101	244	9.715	3	101	244	9.715	10.063	0	0	0	0	0	100



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Ditandatangani secara elektronik oleh :
INSPEKTUR I Wayan Sugiada
 19651231 198603 1 175